

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amal, Ichsanul, 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Andrianus, Tomi dkk, 2006, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Nuansa, Bandung.
- _____, 1985, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Awad Bahasoan, 1985, *Golongan Karya Mencari Format Politik Baru*, LP3S, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1981, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedai Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dahl, Robert A, 2010, *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dhakidae, Dhaniel, 1985, *Analisis Kekuatan Politik Indonesia*, LP3EES, Jakarta
- El-Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Firmansayah, 2008, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gaffar, Affan, 2004, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi Cet keempat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gaffar, Jenedri M, 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

- _____, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ghoffar, Abdul 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati C.F.G, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Haryanto, 1984, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta.
- Husein, Wahyudin H.M dan Hufron H., 2008, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- IDEA, International, 2002, *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Bulls Tryckeri, Sweden.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlemerter Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. ANANDA, Yogyakarta.
- Karim, M Rusli, 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Pasang Surut*, Rajawali, Jakarta.
- Katz, Richard S dan Crotty William (ed), 2014, *Handbook Partai Politik*, Nusa Media, Bandung.
- Latif, Abdul dan Hasbi H., 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lijhpart, Arend, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlemerter Dan Presidensial*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku Ke 2*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mas'ood, Mochtar dan Andrews Colin MacAndrews, 1990, *Perbandingan Sistem Politik* (cetakan kesepuluh), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- MD, Moh. Mahfud 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (edisi revisi), Rineka Cipta, Jakarta.

- _____, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- _____, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, PT. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.
- _____, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Montesquie, De Baron, 2007, *The Spirit of Laws*, Nusa Media, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhjad, Hadin H.M dan Nuswardani, Nunuk 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publisher, Yogyakarta.
- Mukhtie, Fadjar Abdul, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara, Malang
- Nawawi, Hadari 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Nugroho Notosusanto, 1985, *Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- _____, 2011, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute For Democracy and Welfarism, Yogyakarta
- Putra, Fadillah, 2004, *Partai Politik dan Kebijakan Publik* (edisi revisi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rauf, Maswadi dkk, 2009, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ranadireks, Hendarmin, 2002, *Amandemen UUD 45, Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat*, Yapansi, Jakarta.
- Riyanto, Sigit dkk, 2013, *Keterampilan Hukum : Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sanit, Arbi 1986, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan* Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta.

_____ 1985, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Raawali, Jakarta.

Siahaan, Iskandar, 1984, *Politik dalam Persepektif Hukum*, IND-HILL Co, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Hanitijo Ronny, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Strong, C. F, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Cetakan Sepuluh*, Nusa Media, Bandung.

Subakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Sumardjono, S.W Maria, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif Kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Maklumat Wakil Presdien Nomor X Tahun 1945 tentang Pendirian Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Preiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Sjarat-Sjarat Dan Penjederhanaan Kepartaian (Lembaran Negara Nomor 149 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1959 Tahun 1916)

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai. (Lembaran Negara Nomor Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1960)

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai. (Lembaran Negara Nomor Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1960)

Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi. (Lembaran Negara Nomor Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1960)

Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Sosialis Indonesia. (Lembaran Negara Nomor Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1960)

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1961 tentang Pengakuan Partai Politik Yang Sah. (Lembaran Negara Nomor Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1960)

C. Skripsi, Tesis dan Desertasi

Afifi, 2009, *Implikasi Sistem Multi Partai Terhadap Sistem Presidensial Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Alit Amarta Adi, 2012, "Politik Hukum Pengaturan Keuangan Partai Politik di Indonesia", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Dian Agung Wicaksono, 2010, *Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Desain Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indoensia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Rika Anggraini, 2013, "Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia : Menuju Sistem Multi Partai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi", Tesis, Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia, Jakarta.

Muchamad Ali Safa'at, 2009, "Analisis Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004", Disertasi, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar, 2012, Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.

D. Bahan Kuliah

Maria, S.W Sumardjono 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Zainal Arifin Mochtar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Bahan Kuliah, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Internet

Komisi Pemilihan Umum, “Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 1999”, <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>, diakses pada 14 Agustus 2016.

Komisi Pemilihan Umum, “Jumlah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2004”, http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf, diakses pada 14 Agustus 2016.

Komisi Pemilihan Umum, “Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009”, http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf, diakses pada 14 Agustus 2016.

Komisi Pemilihan Umum, “Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014”, <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/282>, diakses pada 14 Agustus 2016.

Komisi Pemilihan Umum, “Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014”, http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_Perolehan_suara_parpol.pdf, diakses pada 16 Agustus 2016.

Kepustakaan Presiden, http://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=20&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status= Diakses 14 Juni 2016.

F. Sumber Lain

Anika Gauja, 2011, *Legislative Regulation, Judicial Politics and the Cartel Party Model*, Paper for the Contemporary Challenges of Politics Research Workshop, Cooge, NSW 2034.

Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949. Diterjemahkan oleh Cristian Tomuscaht & David P. Currie. Revisi terjemahan oleh Critian Tomuschat & Donald P. Kommers, https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf diakses pada 19 Mei 2016.

Casal-Bertoa, Fernando, Piccio, Daniela, Romee, Raskhova, and Ekaterina, 2012, *Party Law in Comparative Perspective*, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, No.16.

Federal Election Act in Germany , https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/downloads/rechtsg_rundlagen/bundeswahlgesetz_engl.pdf diakses 19 Mei 2016.

Fransje Moleenar, 2012, *Latin America Regulation of Political Parties, Continuing Trends and breaks with The Past*, Working Paper Series on The Legal Regulation of Political Party.

Jimly Ashiddiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Bahan Orasi Ilmiah Disampaikan Pada Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan. 29 Desember 2007.

Kenneth Janda, 2005, *Political Parties And Democracy In Theoretical And Parctical Perspectives, Adopting Party Law*, National Democratic Institute, Washington DC.

_____, 2006, *How Nations Govern Political Parties*, Prepared for the 20th World Congress of the International Political Science Assosiation, Special Session 3.476 : Global Theoretical Issues for Political Parties, Fukoka-Japan.

Lauri Karvonen, 2007, *Legislation On Political Partie : A Global Comparasion*, Party Politic Vol.13 No.4, Sage Publication.

Law on Political Parties in Germany, <https://www.bundestag.de/blob/189734/2f4532b00e4071444a62f360416cac77/politicalparties-data.pdf> diakses 19 Mei 2016.

OSCE/ODIHR and Venice Commission, *Guidelines On Political Party Regulation*. Adopted By The Venice Commision. At its 84th Plenary

Session Venice, 15-16 October
2010. <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282010%29024-e> Diakses pada 28 Juni 2016.

OSCE/ODIHR and Venice Commission, *Guidelines On Political Party Regulation. Adopted By The Venice Commission. At its 84th Plenary Session Venice, 15-16 Oktober 2010.*
[http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2010\)024-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)024-e) diakses pada 14 Mei 2016.

Richard S Katz, *Reform Parties Throught Legal Regulation*, (Centro de Estudios Pablicod)